



## BAB III

# TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

### 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan menuju perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan kedepan, kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA terdiri dari:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah – daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.



9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Untuk mendukung sembilan agenda prioritas nasional tersebut khususnya agenda point 2 dan 3, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai yaitu:

- a) perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b) pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan umum dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset;
- c) pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset; dan
- d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Sasaran strategik BPKAD Kabupaten Banggai merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 1 tahun dan dialokasikan secara tahunan melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu rencana kinerja ( *performance plan* ). Penetapan sasaran strategik ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap – tiap tahun untuk kurun waktu 5 tahun.

Sasaran strategik BPKAD Kabupaten Banggai merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja secara lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh yang berarti menyangkut keseluruhan satuan kerja dilingkungan BPKAD Kabupaten Banggai. Sasaran – sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategik yang



terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan strategik terkait juga telah dapat dicapai.

Kemudian pada masing – masing sasaran ditetapkan program yang akan dijalankan untuk mencapai sasaran terkait. Sama seperti sasaran terhadap tujuan, program – program yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian sasaran yang terkait. Secara keseluruhan sasaran dan program BPKAD Kabupaten Banggai untuk mencapai visi sesuai misi masing-masing dapat dijabarkan sebagai berikut :

**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

<b>Visi : Mewujudkan Kabupaten Banggai sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi, Pertanian dan Kemaritiman Berbasis Kearifan Lokal dan Budaya</b>				
<b>Misi : Menciptakan Pemerintahan yang Baik dan Bersih Menuju Pemerintahan yang Berwibawa</b>				
<b>Tujuan : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Melayani</b>				
<b>Sasaran : Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Banggai</b>				
<b>Tujuan</b>	<b>Indikator Tujuan</b>	<b>Sasaran Strategi</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Kebijakan</b>
<i>Meningkatkan Akuntabilitas Tata Kelola Keuangan Daerah</i>	<i>Opini BPK Target WTP</i>	<i>Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</i>	<i>Pengelolaan Keuangan Daerah yang Tertib, Akuntabel dan Transparan</i>	
			<i>Presentase Data Aset yang Akurat</i>	

**3.3. Program dan Kegiatan**

Ada pun program dan kegiatan BPKAD Kabupaten Banggai sebagai berikut :

<b>KODE</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN</b>
<b>01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor



	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
	17	Penyediaan Makanan dan Minuman
	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
	19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
	20	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
<b>02</b>		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>
	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
	10	Pengadaan Meubelair
	11	Pengadaan Bangunan/Sarana Pelengkap Gedung Kantor
	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Sistem Informasi
	45	Rehabilitasi Bangunan/Sarana dan Prasarana Pelengkap Gedung Kantor
<b>03</b>		<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>
	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
<b>04</b>		<b>Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS</b>
	01	Pemulangan Pegawai yang Pensiun
<b>05</b>		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>
	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal
	05	Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur
<b>06</b>		<b>Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>
	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
	02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
	03	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
	04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
	05	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD
	07	Penyusunan Dokumen RKBU Perangkat Daerah
	09	Penyusunan Laporan Inventarisasi Aset Pemerintah Kabupaten Banggai (OPD)
<b>07</b>		<b>Pengembangan Sistem Informasi/Data</b>
	04	Penyediaan Data dan Updating Informasi Perangkat Daerah
<b>15</b>		<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>
	01	Penyusunan Analisis Standar Belanja
	02	Penyusunan Standar Harga Satuan
	04	Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
	06	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD



	08	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Perubahan APBD
	14	Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
	16	Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah
	20	Penatausahaan Barang Daerah
	21	Penyusunan Standar Pelayanan Publik
	22	Penatausahaan Keuangan PD
	23	Penatausahaan keuangan SKPD
	24	Fasilitasi Penyediaan Data BPKAD dan Realisasi Bantuan Keuangan
	25	Fasilitasi dan Penatausahaan TPTGR
	26	Pengembangan dan Pengendalian Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah
	27	Penyelenggaraan program kerja tim pertimbangan dana subsidi, hibah dan bantuan sosial
	28	Penelitian RKA/RKPA dan DPA/DPPA
	29	Pengelolaan Penyaluran Dana Bantuan Keuangan
	30	Penyusunan rancangan peraturan bupati tentang pergeseran anggaran mendahului penetapan perubahan APBD
	32	Asistensi, verifikasi dan pengentrian data anggaran kas PD dalam rangka penerbitan SPD
	33	Penelitian/verifikasi kelengkapan SPM PD dalam rangka penerbitan SP2D
	34	Monitoring dan pembinaan tugas bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan
	35	Penyusunan Laporan Arus Kas
	36	Penatausahaan Administrasi Kas Umum Daerah
	37	Bimtek Penatausahaan Keuangan PD
	38	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Daerah
	39	Penyusunan Laporan Arus Kas
	44	Penatausahaan Administrasi Kas Umum Daerah
	45	Bimtek Penatausahaan Keuangan SKPD
	46	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Daerah
	47	Rekonsiliasi Data dan Penyusunan Laporan Penerimaan Kas Daerah Serta Penyerapan Anggaran Dengan Unit Kerja dan Instansi Terkait
	48	Fasilitasi dan Penatausahaan DPA/DPPA SKPD
	49	Verifikasi dan Finalisasi Daftar Gaji PNS
	50	Sosialisasi Penggajian PNS
	52	Peningkatan dan Pengembangan SDM Penyusun Laporan Keuangan
	55	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBD
	56	Penyusunan Laporan Keuangan Per Triwulan
	62	Penyusunan Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
	63	Pembinaan Sistem Akuntansi SKPD
	64	Rekonsiliasi Realisasi APBD
<b>19</b>		<b>Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa</b>
	03	Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa



<b>23</b>		<b>Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi</b>
	01	Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik
<b>18</b>		<b>Program Pengelolaan Barang Daerah</b>
	01	Pensertifikatan Tanah Aset Pemerintah Daerah
	02	Penyelenggaraan Administrasi Barang Daerah
	03	Penyusunan Laporan Inventarisasi, Evaluasi dan Pengelolaan Aset Daerah
	04	Penghapusan Aset/Barang Milik Daerah
	05	Pembinaan Penyimpan/Pengurus Barang Daerah
	06	Pengkajian dan Fasilitasi Pelaksanaan Pengadaan Barang Daerah
	07	Penyusunan Laporan Realisasi Pengadaan dan Distribusi Aset Daerah
	08	Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan dan Pengelolaan Aset Daerah

Untuk melaksanakan semua program dan kegiatan tersebut di atas dibutuhkan dana secara indikatif sebesar Rp. **10.708.170.027,-** bersumber dari DAU dan PAD.

Sedangkan dari tugas selaku penyalur dana bantuan dan dana bagi hasil yang termasuk dalam fungsi PPKD disesuaikan dengan ketersediaan dana daerah dan kebijakan pemerintah daerah diperkirakan mencapai 400 milyar rupiah.